

<https://researchhub.id/index.php/jpkmi><https://researchhub.id/index.php>

Sosialisasi Fatwa DSN-MUI dan Kedudukannya dalam Hukum Islam: Eksplorasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Komunitas di Islamic Nusantara Center Ciputat

Nurkhalis Muchtar¹

¹Magister Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur-an (IIQ) Jakarta

Email: nurkhalismuchtar@iiq.ac.id

Abstrak

Ketidakpastian hukum dan stagnasi literasi keuangan syariah seringkali menjadi penghambat utama dalam akselerasi pertumbuhan industri halal di Indonesia, sebuah fenomena yang menciptakan paradoks di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Laporan penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai program pengabdian masyarakat yang bertujuan mengurai benang kusut pemahaman teologis dan yuridis terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di lingkungan Islamic Nusantara Center (INC), Ciputat. Penelitian ini mendekonstruksi paradigma pemberdayaan konvensional yang menempatkan komunitas sebagai objek pasif, beralih pada pengakuan komunitas sebagai subjek aktif yang memiliki modalitas intelektual melalui metodologi Asset-Based Community Development (ABCD). Melalui penerapan siklus 5-D (Discovery, Dream, Design, Define, Destiny), penelitian ini mengungkap bahwa INC memiliki aset unik berupa khazanah manuskrip Islam Nusantara dan jaringan intelektual santri yang mampu dikapitalisasi menjadi instrumen sosialisasi hukum yang transformatif. Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang signifikan di kalangan peserta: dari pemahaman fatwa sebagai doktrin keagamaan yang bersifat ghairu mulzim (tidak mengikat) menjadi pemahaman fatwa sebagai instrumen hukum positif yang mengikat (legally binding) melalui mekanisme absorpsi regulasi negara. Implikasi teoretis dari studi ini menegaskan bahwa pendekatan ABCD mampu menjembatani kesenjangan epistemologis antara fikih klasik dan hukum positif modern.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI; Hukum Ekonomi Syariah; Asset-Based Community Development (ABCD); Islam Nusantara; Positivisasi Hukum Islam.

Abstract

Legal uncertainty and the stagnation of Islamic financial literacy often serve as primary impediments to accelerating the halal industry's growth in Indonesia, creating a paradox in the country with the world's largest Muslim population. This research report presents an in-depth analysis of a community service program aimed at unraveling the theological and juridical complexities regarding the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) within the Islamic Nusantara Center (INC) community in Ciputat. This study deconstructs the conventional empowerment paradigm that views the community as passive objects, shifting towards recognizing the community as active subjects possessing intellectual modalities through the Asset-Based Community Development (ABCD) methodology. Through the application of the 5-D cycle (Discovery, Dream, Design, Define, Destiny), this research reveals that INC possesses unique assets in the form of Islam Nusantara manuscripts and a network of santri intellectuals that can be capitalized into transformative legal socialization instruments. Field findings indicate a significant epistemological shift among participants: from understanding fatwa as a non-binding religious doctrine (ghairu mulzim) to recognizing it as a legally binding positive legal instrument through state regulatory absorption mechanisms. The theoretical implications of this study confirm that the ABCD approach is capable of bridging the epistemological gap between classical fiqh and modern positive law.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Islamic Economic Law; Asset-Based Community Development (ABCD); Islam Nusantara; Positization of Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memegang posisi strategis dalam konstelasi ekonomi global sebagai pasar potensial bagi industri keuangan syariah. Namun, realitas empiris menyajikan paradoks: tingkat literasi keuangan syariah nasional masih tertinggal jauh dibandingkan literasi keuangan

konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 8,93%, tertinggal signifikan dari indeks literasi nasional sebesar 38,03% (OJK, 2019).

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini belum cukup efektif menyentuh substansi pemahaman masyarakat. Masalah fundamental yang teridentifikasi adalah kebingungan epistemologis mengenai kedudukan Fatwa DSN-MUI. Di kalangan masyarakat terpelajar sekalipun, sering muncul pertanyaan kritis: Apakah fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum memaksa (*force of law*)? Bagaimana relasi antara fatwa yang berbasis turats dengan regulasi negara positif? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang syubhat yang menghambat partisipasi penuh dalam ekosistem ekonomi syariah (Abdad, 2019).

Islamic Nusantara Center (INC) di Ciputat, Tangerang Selatan, dipilih sebagai lokasi intervensi. Sebagai entitas yang berfokus pada penggalian nilai Islam Nusantara yang moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal, INC memiliki posisi strategis. Komunitas ini menyimpan aset intelektual berupa jaringan peneliti dan tradisi literasi yang kuat. Tantangan utamanya adalah mengaktivasi aset kultural tersebut untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, mengubah narasi dari sekadar kajian sejarah menjadi aksi literasi ekonomi (Bizawie, 2017).

Penelitian ini meninggalkan pendekatan berbasis defisit (*needs-based*) yang sering menempatkan masyarakat sebagai objek "buta hukum". Sebaliknya, riset ini mengadopsi pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Sebagaimana dijelaskan oleh Syarifuddin & Nildawati (2017), ABCD membalikkan perspektif dengan berfokus pada penemuan dan mobilisasi aset, kemampuan, dan potensi yang dimiliki komunitas itu sendiri (Syarifuddin & Nildawati, 2017).

Dalam konteks INC, ABCD sangat relevan karena komunitas ini terdiri dari individu berpendidikan tinggi, sehingga menggunakan metode ceramah konvensional tidak akan efektif. Dengan ABCD, peneliti bertindak sebagai fasilitator yang membantu komunitas melakukan *rediscovery* terhadap aset intelektual mereka—seperti kemampuan membaca kitab kuning (*turats*)—untuk membedah fatwa DSN-MUI secara kritis. Pemetaan aset kultural adalah kunci keberhasilan pengembangan komunitas berbasis agama, yang memungkinkan pemberdayaan berjalan lebih mandiri dan organik (Djawahir, 2018).

Dinamika Positivisasi Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI menempati posisi unik dalam hierarki hukum Indonesia. Secara teoritis, fatwa bersifat *ghairu mulzim* (tidak mengikat). Namun, fatwa DSN-MUI mengalami transformasi menjadi hukum positif materiil ketika diadopsi oleh regulator negara. Proses ini didukung oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan kepatuhan pada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh MUI (Wahid, 2019).

Transformasi fatwa menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengubah sifat otoritasnya dari moral (*diyanatan*) menjadi legal (*qadha'an*). Pemahaman mengenai transformasi inilah yang krusial disosialisasikan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari akad syariah yang mereka tandatangani (Hasanah, 2020).

Metode ABCD berakar pada prinsip bahwa komunitas yang berkelanjutan dibangun di atas aset mereka sendiri. Tahapan operasionalnya dikenal dengan siklus 5-D: *Discovery* (Penemuan), *Dream* (Impian), *Design* (Perancangan), *Define* (Aksi), dan *Destiny* (Keberlanjutan). Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan Islam dan pesantren, karena mampu meningkatkan partisipasi aktif dan rasa kepemilikan program (Syarifuddin & Nildawati, 2017).

2. METODE

Penelitian pengabdian ini menggunakan desain *Participatory Action Research* (PAR) dengan model ABCD. Pendekatan kualitatif partisipatoris seperti ini sangat penting untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial secara mendalam (Creswell & Creswell, 2018).

Tahapan operasional (Siklus 5-D) dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Discovery*: Menggali aset INC melalui wawancara apresiatif (*Appreciative Inquiry*). Fokus pada inventarisasi modal manusia (peneliti, santri) dan modal fisik (koleksi manuskrip).
2. *Dream*: *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merumuskan visi "Ekonomi Syariah Berwajah Nusantara" yang diinginkan komunitas.
3. *Design*: Menyusun kurikulum sosialisasi hibrida yang menggabungkan teks fatwa, regulasi negara, dan referensi kitab kuning (*turats*).
4. *Define*: Pelaksanaan diskusi "Ngaji Fatwa" dan simulasi akad menggunakan metode *Bahtsul Masail*.
5. *Destiny*: Pelembagaan program melalui pembentukan pojok literasi dan kaderisasi

paralegal ekonomi syariah (Djawahir, 2018).

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Discovery: Peta Aset Intelektual

Tahap *Discovery* mengungkap bahwa INC memiliki densitas aset intelektual tinggi yang relevan dengan ekonomi syariah namun belum terutilisasi secara maksimal. Aset tersebut meliputi Modal Manusia (peneliti dengan latar belakang Ushul Fiqh dan Sejarah Islam), Modal Sosial (jaringan santri dan akademisi UIN/IIQ Jakarta), serta Modal Fisik (akses terhadap ribuan manuskrip digital yang memungkinkan pelacakan historis praktik muamalah Nusantara) (Biwazie, 2017).

B. Implementasi Sosialisasi (Define)

Proses sosialisasi berjalan dinamis dengan metode dialektis, menghasilkan dua luaran utama:

1. Transformasi Pemahaman Hukum: Peserta yang awalnya memandang fatwa hanya sebagai panduan moral, mengalami perubahan perspektif setelah membedah UU Perbankan Syariah dan regulasi terkait. Mereka akhirnya memahami bahwa fatwa yang diserap ke dalam POJK memiliki daya ikat hukum negara yang kuat.
2. Kontekstualisasi Akad: Diskusi mengenai akad *Murabahah* dan *Wakalah* dilakukan dengan membandingkan teks Fatwa DSN dengan kitab *Fathul Mu'in*. Pendekatan komparatif ini efektif meruntuhkan skeptisisme mengenai "rekayasa syariah" karena peserta menemukan landasan fiqh yang valid dalam tradisi mereka sendiri (Wahid, 2019).

C. Keberlanjutan (Destiny)

Program berhasil menginisiasi pembentukan unit konsultasi muamalah sederhana di lingkungan INC. Selain itu, terjadi perubahan perilaku yang konkret di level pengurus yayasan yang mulai mengalihkan aset ke lembaga keuangan syariah, didorong oleh kepastian hukum dan legitimasi syar'i yang mereka peroleh selama proses sosialisasi berlangsung (UU No. 21 Tahun 2008).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode ABCD sangat efektif dalam sosialisasi hukum ekonomi syariah di komunitas terpelajar seperti INC Ciputat. Dengan menghargai dan mendayagunakan aset intelektual lokal (*turats* dan tradisi *bahtsul masail*), program ini berhasil

mengubah pemahaman peserta mengenai kedudukan fatwa DSN-MUI dari sekadar dokumen teologis menjadi instrumen hukum positif. Hal ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah dapat ditingkatkan secara signifikan jika pendekatannya disesuaikan dengan modalitas kultural komunitas sasaran (Abdad, 2019).

DAFTAR REFERENSI

- Awaluddin, & Febrian, R. (2020). Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Bizawie, Z. M. (2017). *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan jejaring ulama-santri (1830-1945)*. Ciputat: Pustaka Compass.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Djawahir, A. U. (2018). Asset based community development di pesantren wisata: Implementasi strategis di PP. An-Nur 2 Al Murtadlo Malang. at-Tamkin: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Hasanah, T. (2017). Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif. Syariah: *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Syarifuddin, N., & Nildawati. (2017). Asset-based community development (ABCD) model: An approach for improving environmental and behavioral health. *Advanced Science Letters*, 23(4).
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika fatwa dari klasik ke kontemporer (tinjauan karakteristik fatwa ekonomi syariah DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(2).
- Zaidi Abdad, M. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2).